

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemilihan umum (yang selanjutnya disingkat Pemilu) adalah salah satu instrumen terpenting dalam sistem politik-demokratik modern. Di kebanyakan negara demokrasi, pemilu bahkan dianggap lambang sekaligus tolok ukur dari demokratis atau tidaknya suatu negara. Hasil pemilu yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap mencerminkan dengan agak akurat partisipasi serta aspirasi masyarakat. Sekalipun demikian, disadari bahwa pemilu tidak merupakan satu-satunya tolok ukur dan perlu dilengkapi dengan pengukuran beberapa kegiatan lain yang lebih bersifat berkesinambungan, seperti partisipasi dalam kegiatan partai, lobbying, dan sebagainya (Budiardjo, 2008: 461).

Idealnya, pemilu merupakan proses sekaligus sarana demokratis untuk menyalurkan aspirasi rakyat. Pemilu juga dapat diartikan sebagai proses sirkulasi elit yang bersifat inklusi dimana semua rakyat secara terbuka memiliki kesempatan untuk memilih dan dipilih. Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Rakyat berkesempatan untuk menentukan harapan, keinginan dan berbagai kepentingan

melalui pilihan wakil rakyat yang akan menyuarakan dan menyalurkan aspirasi mereka.

Sistem pemilihan umum di Indonesia perlahan telah berkembang ke arah yang lebih demokratis sejak reformasi tahun 1998. Pemilu 2004 merupakan sebuah lompatan sejarah di Indonesia karena menjadi pemilu pertama yang menggunakan sistem proporsional terbuka, membuktikan bahwa rakyat telah lebih banyak dilibatkan dalam proses politik. Saat itu sistem kepartaian menganut sistem multi-partai (tanpa dominasi satu partai), dimana pemilu diikuti oleh 24 partai dan hanya 7 partai yang lolos ke DPR yaitu Partai Golkar, PDIP, PKB, PPP, Partai Demokrat, PKS, dan PAN (Budiardjo, 2008: 454). Partai politik menjadi instrument demokrasi terpenting yang akan menentukan kualitas dari pemilu. Sejarah partai politik di Indonesia juga merupakan bukti dari aktualisasi masyarakat yang dilembagakan, yang mana entitas dalam masyarakat bersatu dan membentuk partai politik.

Friedrich (dalam Budiardjo, 2006: 404) berpendapat bahwa partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini, memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiil maupun materiil. Partai politik muncul dan berkembang dari anggapan bahwa dengan membentuk suatu wadah mereka dapat menyatukan orang-orang yang memiliki pemikiran dan cita-cita yang sama sehingga orientasi mereka bisa bersama-sama dikonsolidasikan.

Partai politik merupakan salah satu pilar demokrasi, artinya demokrasi tidak akan terwujud tanpa adanya partai politik karena di dalamnya terdapat kepentingan

dari masyarakat yang perlu diperjuangkan. Secara teoritis, dalam sistem politik yang demokratis, partai politik memiliki peranan yang sangat penting terutama dalam rangka proses konsolidasi demokrasi. Peran penting tersebut dikaitkan dengan fungsinya untuk memobilisasi rakyat dalam pemilu, agregasi berbagai kepentingan rakyat, serta mempersiapkan para calon pemimpin yang akan duduk dalam pemerintahan (Asrinaldi, 2014).

Setiap partai politik tentu memiliki strategi yang berbeda-beda untuk memperoleh suara tinggi pada pemilu. Momentum pemilu legislatif menjadi perhatian khusus bagi partai politik karena kemenangannya mampu mengantarkan calon legislator dari partainya lolos ke DPR. Bentuk konsolidasi partai politik dalam hal ini setidaknya memiliki dua dimensi yakni internal dan eksternal (Noor, 2012). Dimensi internal meliputi konsolidasi struktur dan konsolidasi agenda politik (ideologis), sedangkan dimensi eksternal meliputi konsolidasi vertikal dan konsolidasi horizontal. Penelitian ini memilih Partai Keadilan Sejahtera (yang selanjutnya disingkat PKS) karena menganggap bahwa PKS memiliki soliditas yang kuat dalam menghadapi Pemilu Legislatif 2014.

PKS merupakan salah satu partai politik berbasis Islam di Indonesia. PKS sebagai entitas politik nasional, secara subyektif berjuang dengan dasar aqidah, asas, dan moralitas Islam untuk mencapai cita-citanya. Di sisi lain, PKS berkeyakinan bahwa secara internal-subyektif aktivitas politik adalah “ibadah”, yang apabila bertujuan untuk kemaslahatan umat, didasarkan pada niat yang ikhlas untuk mencari ridha Allah SWT, dan dilaksanakan dengan cara-cara yang baik dengan akhlak terpuji, maka aktivitas ini menjadi ibadah yang bernilai “amal

shalih”. Itulah yang menjadi dasar PKS dalam menghimpun kader-kadernya untuk memperjuangkan aspirasi umat dan mencapai tujuan nasional.

PKS sebagai konsekuensi partai kader memiliki karakteristik yang solid yang didukung oleh pondasi ideologi yang kuat, *leadership* yang relatif baik secara internal dan kader-kader yang militan dalam struktur, baik pusat maupun daerah. Walaupun demikian, perbedaan pandangan yang terjadi pasca Pemilu 2004 menyebabkan PKS terpecah menjadi dua faksi, yaitu faksi keadilan dan faksi sejahtera. Hal ini terkait dengan munculnya perdebatan tentang siapa kandidat presiden pada putaran pertama pilpres yang akan didukung PKS. Faksi keadilan merupakan orang-orang tua di dalam PKS dan kelompok yang cenderung konservatif, sedangkan faksi sejahtera adalah kelompok muda alias pembaharu. Bagi faksi keadilan, faksi sejahtera adalah kelompok liberal dalam partai.

Problematika lain yang muncul adalah ketika mendekati Pemilu 2014, banyak prediksi mengenai partai politik berbasis agama yang akan mendapat suara minim. Menurut Airlangga Pribadi selaku pengajar Ilmu Politik UNAIR sebagaimana dilansir oleh Kompas.com (2011), terdapat beberapa hal yang membuat hal itu terjadi. *Pertama*, kesadaran publik yang tidak lagi membedakan partai nasionalis dan agama secara ketat. *Kedua*, partai berbasis agama menghadapi tantangan moral politik jika dibanding partai lain, sehingga diperkirakan mereka gagal membuktikan memiliki sistem nilai dan etika politik yang lebih baik. *Ketiga*, pudarnya politik aliran diikuti menguatnya politik transaksional.

Dalam kasus PKS, isu moral politik yang menimpa kader adalah hal paling krusial yang harus dihadapi menjelang Pemilu 2014. Isu negatif yang paling disorot hingga sekarang yaitu kasus suap impor daging sapi yang dilakukan oleh Luthfi Hasan Ishaq selaku Presiden PKS di awal tahun 2013. Luthfi terbukti menerima suap sebesar Rp 1,3 miliar dari Direktur Utama PT. Indoguna Utama terkait penambahan kuota impor daging sapi di Kementerian Pertanian. Luthfi divonis 18 tahun penjara dan hak politiknya dicabut. Selain itu, publik juga sulit menerima alibi seorang anggota DPR seperti Arifinto dari Fraksi PKS yang tertangkap fotografer sedang menonton gambar porno saat sidang paripurna. Pengunduran diri Arifinto dari anggota DPR memang menyelamatkan muka PKS di tengah hantaman isu negatif saat itu, namun PKS yang memposisikan diri sebagai partai beragama dengan *tagline* bersih dan peduli, terlanjur memperlihatkan kepada publik peristiwa yang menunjukkan bahwa slogan-slogannya selama ini hanya omong kosong.

Kasus suap impor daging sapi yang menjerat elite PKS di atas memang harus dibayar mahal dengan kemerosotan suara partai tersebut. Sejak kasus itu ramai dibicarakan, sejumlah lembaga survei meyakini bahwa perolehan suara PKS di Pemilu 2014 akan turun drastis. Dari yang semula presentase suara PKS sebesar 7,88 persen di Pemilu 2009, diperkirakan akan merosot dan bahkan tidak lolos ambang batas parlemen yang saat itu sebesar 3,5 persen. Dimulai dari hasil survei Litbang Kompas pada Juli 2012 di 33 provinsi yang menunjukkan suara PKS turun drastis ke angka 2,5 persen. Survei Kompas ini mengambil sampel sebanyak 1.008 dengan sampling error kurang lebih 3,1 persen. Terdapat pula hasil survei terakhir Lingkaran Survei Indonesia (LSI) pada Januari 2014, terdapat empat partai politik

yang elektabilitasnya rendah dan terancam tidak lolos ambang batas parlemen yaitu Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebesar 2,2 persen, Partai Nasdem 2 persen, Partai Bulan Bintang (PBB) 0,7 persen dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) 0,5 persen (Kompas.com, 2 Februari 2014). Namun menurut Adjie Alfaraby selaku peneliti LSI sebagaimana dilansir oleh Kompas.com (2014) menyampaikan bahwa PKS akan mampu menembus ambang batas parlemen jika bekerja keras karena partai ini dinilai memiliki solidaritas organisasi dan militansi kader yang cukup kuat.

Tak sampai di sana, survei yang dilakukan oleh *Indonesia Research Center* (IRC) pada Mei 2013 juga menunjukkan bahwa partai Islam ini tidak beranjak di angka 2, yakni hanya sebesar 2,8 persen. PKS juga kalah dari partai baru yaitu Nasdem yang masih mendapat 4,5 persen. Survei ini menggunakan metode multistage random sampling dengan *margin of error* sebesar 2,3 persen (Merdeka.com, 27 Juni 2013). Hasil survei oleh Lembaga Survei Jakarta (LSJ) juga menunjukkan bahwa PKS memiliki elektabilitas yang cukup rendah yaitu sebesar 2,6 persen. Survei ini dilakukan pada Februari 2013, sebulan setelah kasus suap impor daging sapi merebak, dengan responden sejumlah 1.225 dan *margin of error* sebesar 2,8 persen. Lebih mengejutkan lagi survei yang dilakukan Lembaga Survei Nasional (LSN) pada Oktober 2013, yang mana LSN hanya membidik partai-partai berbasis Islam, menunjukkan bahwa partai yang dipimpin Anis Matta tersebut menjadi partai Islam yang paling tidak disukai yakni hanya 30,5 persen. PPP menjadi partai yang paling disukai dengan 45,8 persen, kemudian PKB 44,1 persen, PAN 40,7, dan PBB 35,8 persen (Merdeka.com, 26 November 2013). Hal tersebut

tentu terjadi akibat pemberitaan negatif PKS di media cetak maupun online sejak Mei hingga Oktober 2013.

Meskipun demikian, Lembaga Survei Jakarta (LSJ) telah membuat survei terbaru sepekan menjelang Pileg 2014 yang menunjukkan bahwa elektabilitas PKS sebesar 3,6 persen, naik 1,0 persen bila dibandingkan survei pada Februari 2013. Hasil survei LSJ tersebut ternyata tidak jauh berbeda dengan hasil survei yang dirilis Lembaga Klimatologi Politik (LKP) pada Maret 2014. Hasil survei menunjukkan elektabilitas PKS sebesar 3,7 persen, berada di peringkat atas jika dibandingkan dengan partai Islam lainnya seperti PPP sebesar 3,5 persen, PAN 3,3 persen, dan PBB 1,1 persen (Kompas.com, 14 April 2014).

PKS tentu patut berbangga hati karena rekapitulasi resmi KPU pada Pemilu 2014 menunjukkan bahwa perolehan suara PKS masih berada di angka aman yaitu 6,79 persen. PKS mengalami penurunan sebesar 1,09 persen dari Pemilu 2009 yang saat itu sebesar 7,88 persen. Partai politik lain yang menunjukkan penurunan yang sangat signifikan yaitu Partai Demokrat dari yang sebelumnya 20,85 persen menjadi 10,19 persen. Hal ini mengindikasikan suatu ketidakpuasan rakyat terhadap kinerja kabinet Susilo Bambang Yudhoyono selama 2 periode. Kenaikan yang signifikan diperoleh Partai Gerindra yang sebelumnya 4,46 persen menjadi 11,81 persen dan PDIP yang sebelumnya 14,03 menjadi 18,95 persen. Hal tersebut bukan tanpa alasan, mengingat 2 calon presiden saat itu berasal dari 2 partai tersebut, dan rakyat menganggap keduanya mampu memberi solusi atas permasalahan bangsa. Kenaikan sebesar hampir 100 persen dialami oleh PKB, karena dari 4,94 persen pada Pileg 2009 menjadi 9,04 persen di Pileg 2014.

Kemenangan tersebut terjadi karena efek kembalinya dukungan Nahdlatul Ulama (NU) kepada PKB, mengingat pada 2009 NU sempat hijrah ke beberapa partai lain (Republika, 10 April 2014).

Penurunan perolehan suara PKS sebesar 1,09 persen membuat banyak hasil survei meleset karena selisih angka yang cukup jauh. Menurut hasil survei, perolehan suara PKS di Pemilu 2014 rata-rata hanya 2 – 3 persen, sementara partai ini ternyata masih mampu mencapai suara sebesar 6,79 persen. Hal ini tentu menjadi pertanyaan besar mengingat saat itu PKS sangat terpuruk dengan ditetapkannya Luthfi Hasan Ishaq selaku Presiden PKS menjadi tersangka karena kasus korupsi. Muhammad Anis Matta pun terpilih menjadi Presiden PKS menggantikan Luthfi Hasan karena dianggap sebagai manusia ajaib dengan intelektual di atas rata-rata, yang diharapkan membawa angin segar dan harapan baru bagi PKS untuk mampu bangkit menghadapi Pemilu 2014. Anis Matta pun mampu meyakinkan kader dan simpatisan untuk tetap setia berjuang bersama PKS pasca persoalan yang melibatkan sejumlah petinggi partai.

Anis Matta memang bukan orang baru di PKS, sebelumnya ia menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PKS selama 3 periode sejak tahun 2003. Anis banyak dikenal dan disenangi di PKS, setelah menjabat sebagai Presiden PKS pun ia kerap menemui para kader di daerah untuk memberikan semangat dan meyakinkan bahwa PKS optimis dapat mendulang banyak suara dan mempertahankan eksistensinya di Pemilu 2014. Meskipun topik ini bergulir pada tahun 2014, perlu diketahui bahwa belum ada kajian yang komprehensif mengenai soliditas PKS untuk dapat *survive* pada Pemilihan Legislatif 2014 setelah dihantam isu-isu negatif. Oleh karena itu,

penelitian ini mencoba untuk mengkaji upaya PKS dalam memelihara soliditas partai terutama dalam menghadapi Pemilihan Legislatif 2014, sehingga penelitian ini berjudul Soliditas Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam Menghadapi Pemilu Legislatif 2014.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka dapat disimpulkan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana soliditas Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam menghadapi Pemilihan Legislatif tahun 2014?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui soliditas Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam menghadapi Pemilihan Legislatif tahun 2014.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis
 - a) Diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dan pemikiran mengenai konsolidasi yang efektif dalam upaya memenangkan pemilu, khususnya untuk para calon legislator dalam upaya mendapatkan kursi.

b) Penelitian ini diharapkan dapat membantu pembaca dalam memahami soliditas partai politik dan dapat dijadikan acuan untuk penelitian – penelitian sejenis.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan ilmu pengetahuan di bidang ilmu pemerintahan khususnya untuk penelitian tentang soliditas partai politik.

E. Tinjauan Pustaka

Pada bagian ini, penulis akan memaparkan beberapa penelitian sebagai kajian pustaka yang berhubungan dengan penelitian ini. Tujuan kajian pustaka ini untuk menemukan sisi menarik atau hal lain dari penelitian yang akan dilakukan, sehingga dapat memberikan gambaran perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan penulis. Terdapat 10 (sepuluh) penelitian yang terkait dengan soliditas partai yang dapat mendukung penelitian ini.

Penelitian pertama yaitu penelitian yang dilakukan oleh Liwang (2016). Fokus penelitian ini yaitu mengetahui sejauh mana kekuatan politik dapat memengaruhi kemenangan Adnan Purihcta dalam Pilkada Kabupaten Gowa. Hasil penelitian pun menunjukkan bahwa kekuatan politik seperti birokrasi, partai politik, dan media dapat dijadikan sebuah alat untuk menghadapi proses pilkada.

Penelitian kedua yaitu penelitian yang ditulis oleh Margono (2015). Fokus pada penelitian ini yaitu untuk menganalisis dan mendeskripsikan mengenai soliditas koalisi partai dalam Pencalonan Walikota dan Wakil Walikota pada

Pemilukada Kota Balikpapan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa koalisi partai di Kota Balikpapan dengan koalisi partai di tingkat nasional tidak memiliki hubungan atau pengaruh. Adapun alasannya yaitu dinamika dan konfigurasi politik di pusat dan daerah yang sangat berbeda yang dipengaruhi oleh mekanisme internal partai politik serta kekuatan partai politik di DPRD Kota Balikpapan.

Penelitian ketiga yaitu penelitian yang dilakukan oleh Basyir (2014) dengan topik ideologi politik PKS. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa partai politik yang memiliki latar belakang Islam seperti PKS cenderung mengangkat isu populis untuk kepentingan politik praktis daripada mengedepankan nilai ideologi yang dimilikinya. Hal itu membuat PKS seakan berbalik arah dengan mendekati diri dan terbuka pada partai yang berideologi sekuler atau nasionalis.

Penelitian keempat yaitu penelitian oleh Solihah (2016) dengan topik pengaruh dinamika internal partai. Fokus penelitian ini yaitu untuk mengidentifikasi konflik dan strategi PAN pasca Kongres IV di Bali. Hasilnya menunjukkan bahwa kongres tersebut sempat memunculkan konflik internal antara dua kubu calon ketua umum yaitu Zulkifli Hasan dan Hatta Rajasa. Perubahan pimpinan partai politik tersebut juga mempengaruhi perubahan strategi politik untuk internal maupun eksternal PAN.

Penelitian kelima yaitu penelitian yang dilakukan oleh Djuyandi (2017) dimana penelitian ini fokus terhadap peristiwa dimana Hendra Hemeto yang tidak diunggulkan dapat terpilih menjadi ketua mengalahkan Warsito Somawiyono sebagai kandidat terkuat. Hasil analisis menunjukkan bahwa keberhasilan Hendra

Hemeto tidak terlepas dari pengelolaan komunikasi politik yang baik terutama oleh tim kampanye.

Penelitian keenam yaitu penelitian yang dilakukan oleh Valiana (2016) dengan fokus penelitian untuk mengetahui peran dan strategi komunikasi politik dan mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kemenangan dari pasangan calon kepala daerah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pada masa kepemimpinan pasangan tersebut tidak memiliki cacat sehingga dapat memperkuat komunikasi politik dan kemenangannya.

Penelitian ketujuh adalah penelitian oleh Nurussa'adah (2017) yang mana tujuan penelitiannya untuk menganalisis komunikasi politik PKS dalam keterbukaan ideologi yang dilakukan oleh DPW PKS Jawa Barat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa DPW PKS Jawa Barat melibatkan komunikator-komunikator politik dari dalam dan luar PKS sebagai komunikasi politik dalam rangka keterbukaan ideologi. Dalam komunikasi politik, hal tersebut merupakan bentuk dari propaganda, retorika, lobi politik, kampanye politik, dan public relations.

Penelitian kedelapan yaitu penelitian oleh Gafur (2014) dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa kekuatan utama PKS untuk memenangkan Pemilu Legislatif 2014 di Kota Makassar adalah militansi dan loyalitas kader, infrastruktur partai serta pihak-pihak eksternal dari PKS yaitu para relawan. Adapun partai ini juga melakukan pendekatan kepada masyarakat dengan cara meningkatkan pelayanan sosial, pendidikan, dan keagamaan.

Penelitian berikutnya yaitu penelitian oleh Noor (2012) yang fokus penelitiannya yaitu untuk mengeksplorasi dan menganalisis faktor dan alasan di balik masalah kohesi partai politik Islam dengan mengaitkannya dengan keberadaan pelembagaan partai dengan studi komparatif partai politik Islam yaitu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Penelitian ini meyakini bahwa semakin banyak partai yang dilembagakan yang ditunjukkan oleh adanya kepemimpinan prosedural dalam proses pengambilan keputusan, efektivitas mekanisme resolusi konflik internal, kelanjutan kaderisasi sistematis dan komitmen terhadap nilai-nilai bersama, ada kesempatan yang lebih besar bagi partai untuk mempertahankan kohesinya.

Selanjutnya adalah penelitian oleh Sukmajati (2011) yang memberikan analisis tentang bagaimana cara partai-partai Islam (PAN, PPP, PKB, PBR, PKS, PBB) berorganisasi pasca-Suharto di tingkat regional yakni Kabupaten Tasikmalaya. Penelitian ini menemukan dua temuan utama, pertama yaitu cara para aktor politik Islam mengorganisir partainya menunjukkan partai-partai tersebut mengandung beberapa elemen partai berbasis elite, partai berbasis massa, partai electoral, dan model partai kartal. Kedua, aktor politik Islam mengandalkan perhitungan rasional daripada pertimbangan ideologis.

Penelitian berikutnya yaitu penelitian oleh Hidayat (2012) tentang moderasi AKP di Turki dan PKS di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PKS memiliki lebih banyak kebebasan untuk mengekspresikan ideologinya, maka ia mampu mengembangkan prosedur dan program organisasi internal berdasarkan prinsip-prinsip agama. Selain itu, PKS dinilai telah berhasil dalam mengembangkan

partai yang efektif dan solid, tetapi masih memiliki banyak masalah dalam memperoleh dukungan selama pemilu karena moderasi penyesuaian pragmatismenya juga menghasilkan kebingungan secara internal dan eksternal.

Kemudian terdapat penelitian Arifin (2014) yang fokus terhadap sikap politik PKS terhadap kasus yang menjerat Luthfi Hasan Ishaq. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sikap politik PKS dalam kasus ini dapat dikategorikan menjadi dua yakni dalam bidang politik maupun hukum. Dalam bidang politik, PKS membentuk isu politik di media massa bahwa kasus tersebut merupakan bentuk konspirasi terhadap PKS dan strategi untuk menghancurkan PKS. Sedangkan dalam bidang hukum, PKS memberikan bantuan hukum dengan dibentuknya Tim Kuasa Hukum Luthfi Hasan Ishaq.

Penelitian selanjutnya adalah penelitian oleh Permata (2008) yang mengkaji tentang pengaruh ideologi pada perilaku politik PKS terhadap institusi politik demokratis di Indonesia dengan menggunakan teori neo-institusionalis. Penelitian ini menemukan bahwa perbedaan antara ideologi PKS dan perilakunya bukanlah hasil dari rencana yang disengaja atau agenda tersembunyi untuk menipu permainan demokratis, melainkan pengaruh institusi yang tidak dapat dihindari terhadap perilaku aktor politik.

Yang terakhir yakni penelitian oleh Machmudi (2006) yang menganalisis tentang munculnya Jemaah Tarbiyah hingga menjadi partai politik PKS. Penelitian ini fokus terhadap asal-usul mereka, ideologi, dan upayanya dalam mengIslamkan Indonesia. Studi ini menunjukkan munculnya Jemaah Tarbiyah sebagai gerakan agama terselubung yang diubah menjadi partai politik telah memainkan peran

dalam membentuk dinamika Islam dan politik di Indonesia. Jemaah Tarbiyah dan PKS telah memasuki eksperimen ideologis dan telah memberikan kontribusi unik pada politik Indonesia saat ini dengan menguji sifat hubungan antara politik yang berbasis Islam dan negara sekuler. Studi tentang perkembangan PKS ini juga mengungkap fakta soliditas kader PKS dibandingkan dengan partai-partai Islam lainnya.

Tabel 1.1 Ringkasan Hasil Penelitian Terdahulu

No	Jenis Pengelompokan	Temuan/Hasil
1	Kekuatan Politik dalam Pemilu	Liwang (2016) dan Gafur (2014) Mengemukakan bahwa kekuatan politik seperti birokrasi, partai politik, dan loyalitas kader dapat memengaruhi kemenangan pemilu.
2	Komunikasi Politik dalam Pemilu dan Partai	Djuyandi (2017), Valiana (2016), Nurussa'adah (2017) Mengemukakan bahwa pengelolaan komunikasi politik oleh tim kampanye dan tidak adanya kecacatan pada pasangan calon dapat memperkuat komunikasi politik dan kemenangan dalam pemilu.
3	Soliditas/Kohesi Partai	Margono (2015), Noor (2012) Menganalisis soliditas koalisi partai dalam pemilu dan faktor-faktor kohesi pada partai
4	Dinamika Internal Partai	Solihah (2016), Arifin (2014) Mengemukakan bahwa konflik internal dan kasus yang menjerat elite partai dapat memengaruhi strategi politik partai.
5	Ideologi Partai	Basyir (2014), Sukmajati (2011), Permata (2008), Machmudi (2006), Hidayat (2012) Beberapa hasil penelitian mengungkap bahwa perilaku PKS tidak sesuai dengan ideologi partai, yang mana lebih mengedepankan kepentingan politik praktis dan

		perhitungan rasional daripada ideologinya.
--	--	--

Sumber: Diolah oleh Penulis (2018)

Berdasarkan penelitian–penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa masing–masing penelitian membahas tentang ideologi dan perilaku partai, kekuatan dan komunikasi politik, dinamika internal partai, ideologi partai, kohesi partai, dan soliditas koalisi partai. Terdapat penelitian mengenai faktor-faktor kohesi/soliditas PKS, namun belum ada penelitian yang komprehensif mengenai soliditas PKS dalam menghadapi pemilu. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji bagaimana soliditas PKS dalam menghadapi Pemilu Legislatif 2014.

F. Kerangka Dasar Teori

Dari topik penelitian ini, setidaknya ada dua jenis kerangka teori yang akan digunakan. Yang pertama yaitu tentang soliditas, kedua teori tentang partai politik Islam. Secara spesifik, kedua kerangka teori tersebut akan dijelaskan di bawah ini.

1. Soliditas: Konsep dan Indikatornya

Membangun sebuah organisasi dapat dilakukan dengan menggunakan komponen-komponen yang saling mendukung satu dengan yang lainnya. Takaran atau besaran pada masing-masing komponen juga harus seimbang. Sama halnya dengan membangun rumah, jika tidak seimbang maka tidak ada penyatuan di dalamnya sehingga bangunan tidak dapat berdiri atau tidak tahan lama. Penjabaran di atas dapat diartikan bahwa organisasi yang baik di dalamnya terdapat struktur organisasi yang saling mendukung dan menguatkan. Inilah yang dinamakan soliditas.

Di masyarakat modern seperti saat ini, istilah soliditas tidak hanya digunakan dalam lingkup organisasi, institusi, atau perusahaan. Dalam dunia politik, soliditas memiliki peranan yang sangat penting bagi pelaku politik. Untuk memenangkan pemilu, perlu memilih anggota yang profesional dan berpengalaman, memiliki integritas, loyalitas, komitmen, dan soliditas sebagai anggota tim sukses (Herry, 2005: 16).

Soliditas merupakan kemampuan mempertahankan keberadaan dan keutuhan. Soliditas dapat dimaknai sama dengan kesatuan, harmoni, kohesi, dan homogenitas. Kehadiran soliditas di dalam partai politik seperti sebuah sistem yang akan dikaitkan dengan kemampuan atau kapasitas partai untuk menyatukan dan mempertahankan seluruh subsistem di dalam partai politik dan yang akan memastikan bahwa seluruh unsur dapat bekerja sama dengan baik untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, upaya bagaimana memelihara soliditas partai dan unsur-unsur partai lainnya menjadi penting (Noor, 2015: 25).

Pandangan Singh (dalam Noor, 2015: 25) mengenai latar belakang terciptanya soliditas partai, secara umum terdapat dua faktor yang menjelaskan bagaimana sebuah partai bersifat kohesif, yaitu faktor internal yang berasal dari dalam partai itu sendiri dan faktor eksternal seperti situasi sosio-kultural dan sistem politik tempat dimana partai tersebut eksis. Dimulai dari faktor internal, Singh berpendapat bahwa partai yang menjadikan ideologi – bukan hal-hal yang bersifat pragmatis – sebagai faktor pengikat, maka partai tersebut cenderung mampu mempertahankan soliditas internal. Disini dapat diartikan bahwa partai yang berlandaskan ideologi dengan disiplin tinggi memiliki peluang yang lebih tinggi

untuk menjadi partai yang solid daripada partai yang berorientasi pragmatis. Selain itu, Singh juga meyakini bahwa partai yang memiliki kebijakan rekrutmen yang ketat dan dengan anggota yang terbatas akan lebih solid daripada partai yang terbuka. Ia juga melihat bahwa partai yang kekuasaannya tersentralisasi cenderung lebih mampu menjaga soliditasnya daripada partai yang terdesentralisasi.

Terkait dengan aspek eksternal, Singh berpandangan bahwa sistem presidensial sebagai unsur yang berpotensi dapat melemahkan soliditas partai. Menurutnya hal itu tidak sepenuhnya benar karena fenomena rendahnya soliditas partai juga dapat ditemukan di negara dengan sistem parlementer. Hal ini menunjukkan bahwa sistem politik cenderung bermain sebagai unsur pelengkap dalam soliditas partai. Singh juga menilai bahwa masyarakat yang terpecah berpotensi menghambat perkembangan soliditas, khususnya bagi partai-partai yang berupaya berdiri di atas semua golongan dan menjadi representasi mereka.

Kajian tentang ideologi partai menegaskan adanya korelasi antara ideologi dan soliditas. Seperti kajian Duverger atas partai politik (dalam Noor, 2015: 27) menilai bahwa ideologi sayap kiri lebih mampu mendisiplinkan anggota partai sehingga mampu menciptakan partai yang lebih terkonsolidasi. Ia meyakini bahwa semakin ekstrem ideologi suatu partai politik maka partai tersebut lebih mampu menghindari perpecahan. Selain itu, beberapa akademisi seperti Ware dan Brass yang dilansir dari buku Noor (2015: 28) juga memiliki pandangan lain dalam pembangunan soliditas partai. Ware meyakini bahwa partai politik sejenis “partai kader” lebih mudah untuk mempertahankan soliditas dibandingkan dengan “partai massa” karena partai kader dapat lebih menjamin militansi dan soliditas antara para

kader. Sedangkan Brass melihat bahwa unsur yang sangat fundamental dalam menciptakan soliditas partai adalah pemimpin, hal ini dilihat dari kemampuannya menyatukan kelompok yang didasarkan pada pemahaman atas masalah, penyelesaian konflik, dan mengenali setiap seni manipulasi, termasuk menyediakan imbalan material untuk mempertahankan loyalitas pengikutnya.

Sementara itu, kajian partai demokratik sosial di Eropa Barat telah menunjukkan beberapa kondisi kemunculan soliditas partai, seperti gaya organisasi atau struktur organisasi, ideologi partai, tokoh kharismatik, nilai-nilai pemersatu, dan keadaan eksternal partai seperti sistem politik, masalah-masalah nasional, dan adanya partai-partai pesaing (Noor, 2015: 29). Dalam konteks politik kekinian, menarik juga untuk diperhatikan yaitu kajian oleh Subhan Akbar dalam menganalisis kemampuan Partai Keadilan (PK), pendahulu PKS yang ditulis dalam buku Noor (2015: 29), bahwa soliditas partai adalah hasil dari tiga hal, yaitu keberhasilan membangun ideologi pemersatu, kepemimpinan yang mengedepankan musyawarah, dan sistem kaderisasi yang baik.

Menurut Noor (2015: 44), terdapat empat unsur kelembagaan yang berkaitan dengan soliditas partai politik. Unsur-unsur ini walaupun terpisah namun bersifat interaktif, di mana keempatnya saling mendukung dan memengaruhi satu dengan lainnya. Pembahasan dari empat unsur tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

a) Kepemimpinan Prosedural dalam Proses Pengambilan Keputusan

Kepemimpinan prosedural dalam hal ini menghendaki pelaksanaan kebijakan yang konsisten. Setelah kebijakan itu disepakati dan ditetapkan, tidak ada

alasan bagi partai dan pemimpinnya untuk tidak menjalankan. Tokoh karismatik dapat dimanfaatkan sebagai simbol pemersatu yang menurut Panebianco yang dikutip dari Noor (2015: 44) dapat membawa dampak yang berharga terhadap partai pada momen-momen tertentu. Keberadaan kepemimpinan prosedural di sisi lain juga akan memelihara rasa kebersamaan, karena hal ini menjamin pelaksanaan aturan main secara konsekuen, memberikan perlakuan yang sama kepada seluruh kader, dan kesempatan yang luas kepada kader untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini akan membantu partai untuk menghindari ketidakpercayaan dan perpecahan.

b) Mekanisme Resolusi Konflik

Yaitu mekanisme yang berhubungan dengan upaya-upaya untuk menghentikan dan pengelolaan konflik. Mekanisme ini diyakini dapat membantu mengembangkan keputusan yang bersifat *win-win solution*, yang tentunya bisa memuaskan setiap kelompok yang berkonflik karena hasil yang dianggap adil. Terdapat dua tingkat resolusi konflik yaitu pencegahan konflik dan penghentian konflik. Partai politik yang terlembaga memiliki kapasitas untuk mencegah potensi konflik dan menemukan solusi untuk menghentikan konflik.

Partai politik sudah sepatutnya memiliki aturan untuk memecahkan konflik internal dan membentuk semacam badan yang berfungsi menangani masalah-masalah konflik internal. Ini menjadi penting karena partai politik sebagai sebuah sistem memiliki tanggung jawab untuk memastikan pelaksanaan fungsi partai, termasuk pengelolaan soliditas internal. Tokoh yang berkompeten dan dihormati

harus menjadi bagian dari badan ini, yang dilengkapi dengan hak-hak independen untuk menyusun kebijakan dan bebas dari intervensi (Noor, 2015: 46).

c) Kaderisasi Sistematis

Bagian ini mencakup persoalan seperti menyelenggarakan rekrutmen politik yang *fair*, adanya evaluasi sistematis atas performa kader, pelatihan yang terarah untuk anggota biasa maupun *elite*, dan adanya kepastian jenjang karier. Kegiatan ini harus diikuti dengan pembekalan yang memberikan informasi dasar untuk pegangan anggota, seperti ideologi dan misi partai politik, peran kader sebagai anggota partai dan sebagai bagian dari masyarakat, pengelolaan partai politik dan pengenalan aturan main, dan nilai-nilai bersama yang harus dijunjung tinggi oleh anggota partai.

Kaderisasi juga harus memiliki parameter yang jelas dan mudah dipahami oleh semua kader. Aturan main yang jelas bukan hanya akan menghindari pemahaman sepihak dan eksklusif, tetapi dapat mencegah upaya elite atau siapa pun untuk memanipulasi kegiatan ini demi kepentingan pribadi. Hasil proses kaderisasi harus pula menjadi standar atau tolok ukur bagi rekrutmen jabatan dan seleksi kepemimpinan partai. Rekrutmen tersebut mencakup juga rekrutmen calon legislatif dan seleksi kandidat untuk jabatan eksekutif. Hal ini sesungguhnya merupakan bagian dari upaya mempertahankan koherensi partai dan membangun disiplin internal bagi seluruh anggota (Noor, 2015: 49).

d) Komitmen terhadap Nilai-nilai Bersama atau Ideologi

Partai politik yang terlembaga adalah partai yang mampu membangun nilai-nilai bersama yang telah ditanamkan pada anggota partai, dan dengan berjalannya waktu mampu mengembangkannya dalam masyarakat dan kalangan yang menganut nilai-nilai yang sama. Dalam konteks internal partai, keberadaan komitmen ini ditandai dengan adanya kesungguhan untuk melaksanakan nilai-nilai bersama dan menjadikannya sebagai pedoman dalam menentukan langkah-langkah politik.

Menurut Mandan (dalam Noor, 2015: 51), agar nilai-nilai bersama ini dapat memberikan dampak yang menyeluruh terhadap partai dan anggotanya, sebuah partai harus membangun dan mengembangkan “aparatus ideologi”, yang mana aparatus ini terdiri dari anggota-anggota partai yang berkomitmen tinggi dan bersedia memelihara nilai-nilai bersama tersebut. Nilai-nilai bersama yang dimaksud adalah sebuah kepercayaan bersama yang dapat berasal dari *platform* partai, ideologi, tokoh, kepentingan jangka panjang, atau sebuah perjuangan menyatukan masyarakat dan memberikan identitas.

2. Partai Politik Islam

2. 1. Definisi Partai Politik Islam

Partai politik muncul dan berkembang dari anggapan bahwa dengan membentuk suatu wadah mereka dapat menyatukan orang-orang yang memiliki pemikiran dan cita-cita yang sama sehingga orientasi mereka bisa bersama-sama dikonsolidasikan. Dengan begitu, maka mereka dapat memberikan pengaruh yang kuat dalam pembuatan dan pelaksanaan keputusan (Budiardjo, 2008: 403). Menurut

Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita – cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan UUD RI tahun 1945.

Para ahli klasik dan kontemporer banyak yang mendefinisikan partai politik menjadi beberapa fungsi. Neumann dalam bukunya yang berjudul *Modern Political* (Budiardjo, 2008: 404) berpendapat bahwa partai politik merupakan organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda. Masih dalam buku Budiardjo, Friedrich mengemukakan bahwa partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini, memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiil secara materiil.

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa partai politik merupakan suatu kelompok orang yang terorganisir yang memiliki orientasi dan cita – cita yang sama, dimana mereka bersatu karena persamaan ideologi. Tujuan kelompok ini adalah untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan dengan cara

konstitusional dalam upaya mewujudkan program atau kebijakan yang telah mereka susun sesuai dengan ideologi mereka.

Sebelum mengaitkan partai politik dengan Islam, harus dipahami terlebih dahulu bahwa Islam dalam konteks ini merupakan doktrin agama yang harus diimplementasikan dalam masyarakat untuk mengatur perilaku dan aktivitas manusia sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-Qur'an. Dengan demikian, partai politik Islam dapat diartikan sebagai organisasi publik yang memperjuangkan nilai-nilai Islam dalam konteks yang berbeda-beda melalui penguasaan struktur kelembagaan pemerintah baik pada level legislatif maupun eksekutif (Al-Hamdi, 2013: 9). Oleh karena itu, program-program yang ditawarkan ketika akan menduduki posisi legislatif atau eksekutif pun tidak terlepas dari nilai-nilai yang berlandaskan Islam.

2. 2. Fungsi Partai Politik

Terdapat perbedaan pandangan secara mendasar tentang partai politik di negara yang masih otoriter dan negara yang sudah menjunjung tinggi demokrasi. Di dalam negara demokrasi, partai dapat menjadi sebenar-benarnya wadah bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasi dan memperjuangkan hak – hak masyarakat sesuai dengan harkat dan tujuan partai itu sendiri. Sedangkan di negara otoriter, partai menjadi alat penguasa untuk memuaskan kehendaknya sehingga partai tidak berfungsi sesuai harkatnya. Di bawah ini akan dijelaskan fungsi – fungsi partai politik pada negara demokrasi yang dikutip dari buku Budiardjo (2008: 405).

a) Sebagai Sarana Komunikasi Politik

Seiring dengan permasalahan masyarakat yang semakin kompleks, terdapat aspirasi yang semakin beragam pula. Proses penyaluran sendiri terbagi menjadi beberapa tahapan, 2 (dua) diantaranya merupakan fungsi komunikasi partai politik. Proses pertama yaitu agregasi atau penggabungan kepentingan. Disinilah aspirasi masyarakat (baik individu maupun kelompok) akan ditampung dan digabungkan dengan aspirasi orang lain yang dirasa sama sehingga aspirasi tersebut dapat diproses. Tahap selanjutnya yaitu artikulasi atau perumusan kepentingan. Tahap ini akan mengolah dan merumuskan aspirasi setelah aspirasi digabungkan.

Dalam menjalankan fungsi ini, partai politik dianggap sebagai perantara ide dan pendapat. Oleh karena itu, masyarakat menganggap partai politik seperti “pengeras suara”, dan penguasa atau pemerintah bertindak sebagai alat pendengar. Fungsi komunikasi politik ini dinilai berhasil apabila aspirasi dan pendapat dari masyarakat disampaikan melalui parlemen kepada pemerintah dan dijadikan kebijakan publik (Budiardjo, 2008: 406).

b) Sebagai Sarana Sosialisasi Politik

Definisi sosialisasi politik yang mudah dipahami disampaikan oleh ahli sosiologi politik Rush (1992) yang dikutip oleh Budiardjo (2008: 407). Ia mengungkapkan bahwa sosialisasi politik merupakan proses dimana masyarakat dapat belajar dan mengenali sistem politiknya, dan proses ini yang nantinya akan menentukan bagaimana reaksi dan persepsi masyarakat terhadap fenomena politik di sekitarnya.

Proses sosialisasi berkembang melalui berbagai lini, salah satunya partai politik. Partai menjadi perantara yang berfungsi mensosialisasi nilai – nilai politik

untuk beragam kalangan, dari generasi yang satu ke generasi lainnya. Pelaksanaannya dilakukan melalui berbagai cara, seperti ceramah, pelatihan kader, penataran, media massa, dan sebagainya. Disini partai dapat memainkan fungsinya sebagai sarana dalam sosialisasi politik.

c) Sebagai Sarana Rekrutmen Politik

Dikutip dari Budiardjo (2008: 408), fungsi rekrutmen politik ini berhubungan dengan 2 (dua) masalah seleksi kepemimpinan (*leadership*), yaitu kepemimpinan internal partai dan kepemimpinan yang lebih luas. Setiap partai tentunya membutuhkan kader – kader yang berkualitas untuk kepentingan internalnya. Kader yang berkualitas akan lebih mudah untuk mengembangkan diri dan bertahan dalam politik yang sangat dinamis. Dengan demikian, partai akan lebih mudah pula untuk menentukan pemimpinnya sendiri dan memiliki peluang untuk mengajukan calon pada bursa kepemimpinan nasional.

Selain hal di atas, partai politik juga berkesempatan untuk memperbanyak anggota dengan perluasan jaringan. Maka didirikanlah cabang-cabang partai di wilayah atau daerah untuk menarik anggota/kader sebanyak-banyaknya. Kelestarian dan kontinuitas partai ditentukan oleh rekrutmen politik, karena di sinilah akan dilakukan cara untuk menjaring dan melatih calon – calon pemimpin. Rekrutmen politik dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu melalui persuasi langsung kepada masyarakat, jaringan pribadi, dan lain sebagainya.

d) Sebagai Sarana Pengatur Konflik

Di masyarakat yang modern dan heterogen seperti saat ini, potensi konflik dalam masyarakat tidak bisa dihindari. Setiap perbedaan etnis, agama, sosial – ekonomi, di dalamnya memiliki potensi konflik yang luar biasa jika berkembang di masyarakat. Peran partai politik dibutuhkan untuk membantu pemerintah mengatasi hal demikian, atau setidaknya dengan upaya sedemikian rupa dapat meminimalisir akibat – akibat negatif yang dapat memecah belah bangsa.

Seperti pendapat Liphart (1968) dalam Budiardjo (2008: 409), perbedaan – perbedaan dan perpecahan yang berkembang di tingkat masyarakat dapat diatasi dengan kerja sama di antara elite–elite politik. Singkatnya, partai politik dan berperan sebagai penghubung masyarakat dan pemerintah baik secara organisasional maupun psikologis. Pada akhirnya, keberhasilan atau kegagalan partai politik dapat diukur dengan pelaksanaan fungsi – fungsi tersebut.

2. 3. Tujuan dan Fungsi Partai Islam

Tujuan dari partai politik Islam tentunya tidak terlepas dari keberadaan sebuah institusi negara sebagai media bagi partai Islam untuk mewujudkan cita-cita besar Islam. Adapun tujuan tersebut dapat dirumuskan dalam satu ayat Al-Qur'an yang berbunyi *Baladatun thayyibatun warabbun ghafur* yang artinya terwujudnya sebuah negara yang terdiri atas masyarakat yang adil, makmur, dan sjahtera yang diridhai oleh Allah SWT (Al-Hamdi, 2013: 10). Dari tujuan tersebut, Al-Hamdi (2013) merumuskan tiga tujuan utama partai politik Islam, yaitu:

- a) Masyarakat yang adil, di mana tidak ada satu pun warga negara yang merasa terintimidasi dan mendapatkan hak-haknya sebagai warga dalam suatu

negara, seperti hak hidup, hak berbicara, hak mendapatkan keamanan, dan lain sebagainya.

- b) Masyarakat yang makmur dan sejahtera, karena dengan dua hal tersebut dapat tercapai hidup yang bahagia. Makmur mengindikasikan kehidupan seseorang sudah cukup dari segi materi, dan sejahtera mengindikasikan seseorang bahagia dari segi materi dan juga psikis.
- c) Masyarakat yang aman dan nyaman, dengan membuat warganya merasa aman dari berbagai bentuk kejahatan maupun tidak kriminal, dan nyaman karena rasa bahagia dengan hidup dalam lingkungan tertentu dan tidak ada gangguan di dalamnya.

2. 4. Klasifikasi Partai Islam

Menurut temuan Geertz (dalam Al-Hamdi, 2013: 14), umat Islam dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu Abangan, Santri, dan Priyayi. Temuan Geertz ini masing-masing tentunya mewakili budaya yang berbeda-beda. Abangan merupakan kelompok Muslim yang mengadopsi nilai-nilai tradisi dan budaya animisme dan dinamisme dalam kehidupan keagamaannya. Secara formal memang beragama Islam, namun pada praktiknya mereka lebih didominasi oleh ritual dan tradisi lokal yang sifatnya tradisional.

Kemudian kelompok santri, di mana kelompok ini lebih memusatkan perhatiannya pada ibadah ritual serta menjadikan Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai landasan dalam praktik kehidupan keagamaannya. Kelompok ini terbagi menjadi dua sub-kategori sesuai riwayat pendidikan dan tempat tinggal mereka, yakni tradisional yang berlatar belakang pesantren dan mayoritas tinggal di

pedesaan, dan *modern* dengan latar belakang pendidikan sekolah dan mayoritas tinggal di perkotaan. Yang terakhir yaitu kelompok priyayi, yakni kelompok yang berasal dari keluarga aristokrat yang dalam kehidupan keagamaannya banyak diwarnai oleh nilai-nilai etika kebangsawanan Jawa.

Sementara itu, Permata (2010: 18-21) sebagaimana yang dikutip oleh Al-Hamdi (2013: 15) mengelompokkan partai Islam di Indonesia ke dalam tiga kategori sesuai dengan basis sosio-kultural keagamaan Muslim Indonesia, yaitu Partai Islam Tradisionalis, Partai Islam Modernis, dan Partai Islamis. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

1) Partai Islam Tradisionalis

Istilah “tradisionalis” merujuk pada masyarakat yang masih meyakini dan melaksanakan adat-istiadat yang telah menjadi warisan para pendahulunya. Dalam konteks ini, dapat dipahami bahwa partai ini merupakan partai Islam yang kuat terutama pada masyarakat pedesaan. Basis sosial partai ini merujuk pada organisasi Islam tradisionalis terbesar, yaitu NU. Partai politik yang termasuk dalam kategori ini adalah PKB, PPP, PKU, PNU, dan PPNUI. Menurut Al-Hamdi (2013: 17), ciri-ciri partai Islam tradisionalis adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki kesamaan identitas “Islam tradisional” antara elite dan basis pendukung
- b. Basis pendukung utama berasal dari kawasan pedesaan dan pedalaman (meskipun di perkotaan tetap ada)

- c. Meskipun ada yang menggunakan Pancasila sebagai dasarnya, hakekatnya setiap gerakan dan doktrinnya berdasar pada ajaran-ajaran Islam
- d. Khusus untuk PKB, partai ini tidak hanya sekadar partai tradisional, tetapi juga dikelompokkan sebagai partai post-tradisionalis dengan asas Pancasila. Secara sederhana, kelompok post-tradisionalis dapat dikatakan sebagai titik temu antara kelompok tradisional dan modernis
- e. Secara kultural, partai ini cenderung dekat dengan NU baik secara organisatoris maupun individu-individunya.

2) Partai Islam Modernis

Istilah “modernis” merujuk pada satu kondisi kekinian, rasional, dan biasanya terdiri dari masyarakat perkotaan. Dalam konteks ini, partai Islam modernis merupakan partai politik dengan masyarakat Muslim yang sudah maju dan biasanya berada di kawasan perkotaan. Sebagai masyarakat yang berpikir rasional dan pragmatis, mereka tidak mudah untuk diarahkan pada satu pilihan tertentu. Partai politik yang termasuk dalam kategori ini adalah Masyumi, PAN, PBB, PSII, PMB, dan PUI. Adapun ciri-ciri dari partai Islam modernis menurut Al-Hamdi (2013: 19) yaitu:

- a. Basis pemilihnya merupakan kelompok Muslim terdidik (setidaknya pernah mengenyam pendidikan universitas)
- b. Asas partai Pancasila (cenderung nasionalis) dan tidak menggunakan symbol atau atribut Islam pada aksi-aksinya

- c. Secara geografis, basis pemilih utamanya berada di perkotaan dan sub-urban, tetapi tidak menutup kemungkinan banyak juga di pedesaan dan pedalaman
- d. Secara kultural, partai-partai yang masuk dalam kategori ini dekat dengan ormas Islam seperti Muhammadiyah dan Al-Irsyad
- e. Isu yang diangkat ke publik adalah persoalan-persoalan sosial seperti pendidikan, kesehatan, kemiskinan, HAM, pluralism, dan lain sebagainya.

Secara spesifik, partai Islam modernis diklasifikasikan ke dalam dua kelompok lagi. *Pertama* yaitu Partai Islam Neo-Modernis, yang mana partai ini cenderung anti-negara Islam. Kelompok ini dapat juga disebut Partai Islam Reformis, yang termasuk dalam kategori ini adalah PAN. *Kedua* yaitu Partai Islam Akomodasionis, yang mana ideologi partai seringkali tidak menjadi pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan. Partai ini cenderung memiliki pola pikir lebih kepada keuntungan, tidak ingin berseteru dengan pemerintah, serta berorientasi pada kepentingan “kekuasaan” semata tanpa memperjuangkan basis konsituennya. Partai model ini bisa menggejalai di semua partai Islam.

3) Partai Islamis

Yang dimaksud dengan Partai Islamis adalah partai yang mengadopsi Islam terutama ajaran-ajaran yang terkandung dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai ideologi mereka. Kelompok ini berkeyakinan bahwa demokrasi dan kondisi kekinian hanya sebagai alat dan media untuk mengimplementasikan gagasan

negara Islam serta cenderung tertarik dengan hal-hal yang simbolik dan anti-barat. Karena itu, partai-partai Islam yang termasuk dalam kelompok ini yakin bahwa asas partai mereka adalah Islam. Al-Hamdi (2013: 20) memaparkan lima ciri-ciri Partai Islamis, yaitu:

- a. Memiliki basis konstituen dari kelompok Islam militant dan ideologis
- b. Asas partai dalam kelompok ini adalah Islam dan cenderung selalu mengajarkan apa yang tekstual dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah
- c. Sebagian latar belakang pendidikan elitnya dari Timur Tengah dan sebagian yang lain adalah mantan aktivis dakwah kampus ketika menjadi mahasiswa
- d. Baik elite maupun pendukungnya adalah kelompok anak muda dan secara geografis tinggal di perkotaan
- e. Partai-partai yang termasuk kelompok ini cenderung lebih dekat ke Gerakan Tarbiyah, Hizbut Tahir, NU, Majelis Mujahidin, dan sejumlah organisasi Islam radikal lainnya.

G. Definisi Konseptual

Definisi konseptual adalah suatu pemikiran dari penulis yang berusaha menjelaskan batasan suatu konsep dengan singkat dan jelas. Adapun definisi konseptual yang terdapat dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Soliditas adalah kekuatan bagi suatu organisasi/perusahaan/partai politik untuk mempertahankan dan memelihara keutuhannya.

2. Partai politik Islam adalah suatu kelompok orang yang terorganisir yang memiliki orientasi dan cita – cita yang sama, dimana mereka bersatu dengan tujuan merebut dan mempertahankan kekuasaan dengan cara konstitusional dalam upaya mewujudkan program atau kebijakan sesuai nilai-nilai ajaran Islam.

H. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan bagian fundamental dalam suatu penelitian, karena bagian ini akan memberikan petunjuk dalam mengukur suatu variable dalam melakukan penelitian. Disini akan ditentukan indikator variabel dan bagaimana mengukur indikator tersebut. Definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini yaitu empat unsur pelebagaan yang berkaitan erat dengan soliditas partai politik oleh Noor (2015) yang penjelasannya adalah sebagai berikut:

- a) Kepemimpinan Prosedural

- 1) Struktur kepengurusan

Berkaitan dengan mekanisme pengambilan keputusan agar sesuai prosedur

- 2) Tokoh karismatik

Sebagai simbol pemersatu dan dapat membawa dampak yang berharga terhadap partai pada momen-momen tertentu

- b) Mekanisme Resolusi Konflik

Terdapat dua tingkat resolusi konflik, yaitu:

- 1) Pencegahan konflik

Berkaitan dengan kapasitas partai dalam mencegah potensi konflik

2) Penghentian konflik

Berkaitan dengan kapasitas untuk menemukan solusi komprehensif dalam menghentikan konflik

c) Kaderisasi Sistematis

1) Mekanisme Kaderisasi

Berkaitan dengan pengembangan kualitas kader

2) Rekrutmen Politik

Berkaitan dengan rekrutmen calon legislator dalam internal dan eksternal partai

d) Komitmen terhadap Nilai-nilai Bersama atau Ideologi

1) *Platform* Partai

Pelembagaan ideologi dapat dilihat dari *platform* partai yang meliputi visi misi serta program-program partai

2) Komitmen kader

Berkaitan dengan sikap/perilaku kader untuk tidak menyimpang dari ideologi partai dan tidak melanggar nilai-nilai bersama.

I. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat kepustakaan (*library research*). Menurut Nazir (2003: 27), studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku – buku, literatur – literatur, catatan – catatan, dan laporan – laporan yang ada

hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Studi kepustakaan merupakan langkah yang penting dimana setelah menentukan topik penelitian, langkah selanjutnya yaitu pencarian teori dengan mengumpulkan informasi – informasi serta data yang berhubungan dengan topik penelitian. Kemudian, langkah selanjutnya yaitu melakukan kajian dan analisis mengenai teori yang sudah ditemukan.

Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan bersifat deskriptif dimana dengan disusun dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan metode alamiah (Moleong, 2010: 207). Kualitatif dipilih karena dirasa sangat tepat untuk diterapkan dalam penelitian ini karena memberikan kesempatan peneliti untuk menganalisis dan fokus ke dalam topik yang akan diteliti secara mendalam, sistematis, dan menyeluruh.

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus (*case study*). Creswell (dalam Sugiyono, 2010) mengemukakan bahwa studi kasus merupakan jenis pendekatan yang bertujuan untuk menyelidiki dan memahami sebuah peristiwa atau masalah dengan mengumpulkan berbagai macam informasi yang relevan yang kemudian diolah dan dianalisis untuk mendapatkan sebuah solusi atau jawaban atas peristiwa yang terjadi. Studi kasus penelitian ini adalah Partai Keadilan Sejahtera dalam konteks soliditas pada Pemilu Legislatif 2014.

2. Sumber Data

Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang sumber datanya berasal dari data – data kepustakaan. Data tersebut dikumpulkan dengan cara mencari, memilih, memilah, menyajikan dan menganalisis data–data literatur yang berkaitan dengan topik penelitian. Adapun data primer pada penelitian ini adalah berita online dari media bereputasi dan kredibel seperti kompas.com dan republika.co.id sebagai media utama beserta sedikit tambahan dari media lain dan website Partai Keadilan Sejahtera, sedangkan data sekunder pada penelitian ini yaitu data dari website KPU Pusat, lembaga survei pemilu, jurnal–jurnal, dan buku–buku ilmiah yang sesuai dengan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data sangat erat kaitannya dengan masalah penelitian yang ingin dipecahkan. Karena penelitian ini bersifat kepustakaan (*library research*), teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data yaitu dengan menghimpun data dan informasi dari berbagai sumber terpercaya, terutama dari media elektronik yang relevan dengan topik penelitian. Secara spesifik, penelitian ini akan fokus dan berkonsentrasi pada berita yang terkait dengan PKS dari media bereputasi dan kredibel seperti kompas.com dan republika.co.id sebagai media utama dan sedikit tambahan dari media lain dengan rentang waktu antara Januari 2013 saat kasus Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaq mulai ramai diperbincangkan hingga April 2014 saat Pemilihan Legislatif 2014.

Secara lebih teknis lagi, penelitian ini akan menggunakan beberapa kata kunci untuk pencarian data di internet melalui media-media elektronik yang sudah disebutkan di atas. Kemudian, semua data yang terkumpul dijadikan dalam satu folder lalu dipilah lagi untuk menemukan data yang relevan. Setelah memastikan bahwa yang data yang didapat relevan dengan topik penelitian, selanjutnya data-data tersebut diklasifikasikan berdasarkan indikator-indikator yang sudah ditetapkan.

4. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data, penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dimana data yang diperoleh diklasifikasikan, dijabarkan dengan bentuk kata-kata atau kalimat yang dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. Data-data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambaran, dan angka-angka. Dengan demikian laporan penelitian ini akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberikan gambaran penyajian laporan tersebut.

Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif, yaitu menjelaskan fenomena secara singkat dengan melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan (Moleong, 2010: 208).

- a. Reduksi data: Proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data mentah atau data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Data yang sudah terkumpul dipilih dan dipilah untuk menemukan data yang relevan, sehingga terdapat beberapa data yang tidak terpakai. Hal ini akan memudahkan penulis mengklasifikasikan data.

- b. Penyajian data: penyusunan informasi yang kompleks ke dalam suatu bentuk yang sistematis, sehingga menjadi lebih selektif dan sederhana serta memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan data dan pengambilan tindakan. Data disajikan berdasarkan klasifikasi, sehingga masing-masing data dapat mendukung setiap indikator. Data disajikan dalam bentuk tulisan, tabel, dan gambar. Selain itu, di dalam penulisan karya ilmiah ini terdapat kutipan langsung maupun tidak langsung.
- c. Kesimpulan: Ini adalah tahapan akhir dalam proses analisa data. Pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh dari studi kepustakaan.

Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan *big data*, yakni data yang terekam secara digital dengan jumlah yang berlimpah dan mudah didapatkan. *Big data* telah mendobrak tradisi lama penelitian ilmu sosial, karena memberikan solusi bagi penelitian sosial, khususnya untuk menangkap realita seperti pola jaringan komunikasi, diseminasi informasi, atau bahkan memprediksi pola gerakan sosial atau politik berdasarkan perilaku secara online (Rumata, 2016: 156). Penggunaan *big data* mengacu pada proses mengumpulkan, mengorganisasikan dan menganalisa sekumpulan *big data* untuk mendapatkan pola-pola informasi yang relevan dengan topik penelitian.

J. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis dan konsisten serta dapat menunjukkan gambaran yang utuh dalam penelitian skripsi ini, maka penulis menyusun sistematika sebagai berikut:

Bab I yang merupakan Pendahuluan, menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka dasar teori, definisi konseptual, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II yaitu Gambaran Umum, yang memaparkan secara singkat profil dan informasi yang mendasar tentang obyek penelitian yaitu Partai Keadilan Sejahtera.

Bab III adalah Hasil dan Pembahasan yang akan menguraikan hasil dari seluruh rangkaian kegiatan penelitian tentang soliditas Partai Keadilan Sejahtera dalam menghadapi Pemilihan Legislatif 2014, kemudian hasil tersebut dianalisis dan dijabarkan.

Bab IV adalah Penutup, memaparkan tentang kesimpulan yang diambil berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan saran untuk pengembangan lebih lanjut.